

Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Pelindo Marine Service

(Implementation of Health Management System and Work Safety (SMK3) at PT. Pelindo Marine Service)

Nurul Sapta Widodo, Dedy Kristiawan

**Program Studi Nautika,
Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah**

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi SMK3 serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SMK3 di PT. Pelindo Marine Service. Metode untuk mendapatkan informan indepth interview yaitu dilakukan secara purposive sampling, dengan informan penelitian adalah pihak-pihak memiliki wewenang dan pengetahuan mengenai implementasi K3 di PT. PMS. Sebagai instrumen, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipatif dan unsur informan adalah Direksi, Bagian K3, dan Pekerja. Diperoleh tingkat capaian implementasi Sistem Manajemen K3 tingkat lanjutan di PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya yaitu 83% . Untuk aspek Struktur Birokrasi PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya mampu mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang dapat berintegrasi dengan manajemen perusahaan. Untuk aspek disposisi PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya telah memiliki kebijakan K3 dan komitmen tertulis yang diperbarui dan telah diajukan kepada pimpinan puncak. Untuk aspek Sumber Daya PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya telah memiliki tim P2K3 dengan sekretaris P2K3 yang telah bersertifikasi Ahli K3 umum sesuai dengan peraturan dan perundangan dan perwakilan ahli K3 dari tiap divisi. Untuk aspek komunikasi PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya antara pihak manajemen dan pihak lain di perusahaan dilaksanakan secara lisan maupun persuratan. Bagi visitor wajib mengikuti safety induction sebelum memasuki area pabean. Model implementasi sistem manajemen K3 terdiri dari aspek-aspek yang mendukung tercapainya implementasi berdasarkan tujuan sistem manajemen K3.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Abstract: The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of SMK3 and the factors that support and hinder the implementation of SMK3 at PT. Pelindo Marine Service. The method for obtaining in-depth interview informants was carried out by purposive sampling, with the research informants being parties with the authority and knowledge regarding the implementation of K3 at PT. PMS. As an instrument, researchers are directly involved in participatory observation and the informant elements are the Board of Directors, the K3 Section, and the Workers. Obtained the level of achievement of the implementation of an advanced level of K3 Management System at PT. Pelindo Marine Service (Persero) Surabaya Container Terminal, namely 83%. For aspects of the Bureaucratic Structure of PT. Pelindo Marine Service (Persero) Surabaya Container Terminal is able to implement an OHS management system that can integrate with company management. For the Disposition aspect of PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya has an updated K3 policy and written commitment which has been submitted to top management. For the resource aspect of PT. Pelindo Marine Service (Persero) Surabaya Container Terminal already has a P2K3 team with P2K3 secretaries who have been certified as general K3 experts in accordance with the regulations and laws and representatives of K3 experts from each division. For the communication aspect of PT. Pelindo Marine Service (Persero) Surabaya Container Terminal between the management and other parties in the company is carried out verbally or correspondingly. Visitors must follow the safety induction before entering the customs area. The K3 management system implementation model consists of aspects that support the achievement of implementation based on the objectives of the K3 management system.

Keywords: Occupational Health and Safety Management Systems

Alamat korespondensi:

Nurul Sapta Widodo, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan A. R. Hakim 150, Surabaya. e-mail: jurnal.pdp@hangtuah.ac.id

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelatihan K3 yang ditujukan kepada pekerja/karyawan di perusahaan dapat menghindarkan pekerja/karyawan dari resiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, keselamatan manusia dan lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh kecelakaan. Suatu keharusan menggunakan alat pelindung diri dan alat keselamatan lain pada saat bekerja, namun masih terdapat beberapa pekerja yang belum mau menggunakan alat pelindung diri. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kesadaran para pekerja mengenai keselamatan dirinya sendiri dan banyak dari pekerja/karyawan yang masih belum paham mengenai K3. Selain itu alasan yang paling banyak ditemui pada saat melakukan inspeksi ke lapangan mengenai penggunaan alat pelindung diri adalah rasa yang tidak nyaman apabila menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri maritim PT. PMS menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu OHSAS: 2017 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kerja. OHSAS atau singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001) adalah suatu standar internasional untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja/perusahaan. Banyak organisasi di berbagai Negara telah mengadopsi OHSAS 18001 untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang mengharuskan organisasi secara konsisten mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; serta

memperbaiki kinerja dan citra perusahaan. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi Sistem Manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang NO. 01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003. SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja, dan pihak lain yang terkait.

Implementasi Kebijakan Publik

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195), Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan keputusan kebijakan.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dalam mengkaji suatu pelaksanaan yang menyangkut kebijakan, utamanya masalah pelayanan kesehatan lebih khusus mengenai sistem rujukan perlu pemahaman yang mendalam dengan masalah tersebut untuk mendapatkan justifikasi ilmiah dengan pengukuran metodologi. Tabel 1 menjelaskan beberapa teori pelaksanaan (implementation) yang menjadi landasan teori.

Tabel 1
Teori Pelaksanaan

No.	Teori Implementasi	Variabel
1.	Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier	1. Karakteristik dari masalah. 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang. 3. Variabel lingkungan.
2.	Model Van Meter Van Horn	1. Standar dan sasaran kebijakan. 2. Sumber daya. 3. Hubungan antar organisasi. 4. Karakteristik agen pelaksana. 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
3.	Model George Edwards III	1. Komunikasi. 2. Sumber daya. 3. Disposisi. 4. Struktur birokrasi.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi/ taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja (Rijuna Dewi, 2006).

Rizky Argama (2006), program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

Dessler (1992) mengatakan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan karena tiga alasan pokok, yaitu

1. Moral. Para pengusaha menyelenggarakan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit kerja pertama kali semata-mata atas dasar kemanusiaan. Mereka melakukan hal itu untuk memperingan penderitaan karyawan dan keluarganya yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2. Hukum. Dewasa ini, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal keselamatan dan kesehatan kerja, dan hukuman terhadap pihak-pihak yang melanggar ditetapkan cukup berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, perusahaan dapat dikenakan denda, dan para supervisor dapat ditahan apabila ternyata bertanggungjawab atas kecelakaan dan penyakit fatal.
3. Ekonomi. Adanya alasan ekonomi karena biaya yang dipikul perusahaan dapat jadi cukup tinggi sekalipun kecelakaan dan penyakit yang terjadi kecil saja. Asuransi kompensasi karyawan ditujukan untuk memberi ganti rugi kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Schuler dan Jackson (1999) mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2. Meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen.
3. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.

4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan ras kepemilikan.
6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan.
7. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial.

Menurut Robiana Modjo (2007), manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain

1. Pengurangan Absentisme. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang.
2. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari mereka.
3. Pengurangan Turnover Pekerja. Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan Produktivitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulistyarini (2006) di CV. Sahabat Klaten menunjukkan bahwa baik secara individual maupun

bersama-sama program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

Implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum harus mengacu pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Pekerjaan yang layak bagi manusia adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, sesuai harkat dan martabat manusia, sehingga pekerja, buruh, karyawan yang bekerja di tempat kerja berada dalam kondisi sehat, selamat dan terhindar dari penyakit dan kecelakaan di tempat kerja. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang khusus untuk keselamatan kerja, untuk menggantikan undang-undang keselamatan yang diterbitkan di jaman Belanda pada tahun 1910 yaitu *Veiligheid Reglement* (VR) yang bersifat represif sedangkan Undang-Undang no. 1/1970 bersifat preventif.

Ruang lingkup dari Undang-Undang no. 1/1970 adalah mencakup keselamatan kerja di semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, di dalam air maupun di udara di wilayah negara Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya, keterkaitan dengan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri harus merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi, berkaitan dengan undang-undang K3 tersebut, maka berbagai peraturan Menteri Tenaga Kerja tercantum dalam pasal-pasal dari undang-undang tersebut.

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditinjau dari segi keilmuan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapan mencegah

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi perusahaan (Tarwaka, 2008 dalam Pangkey, 2012) adalah 1. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian-kerugian lainnya; 2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan; 3. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3; 4. Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit; 5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui studi kasus penelitian ini dilakukan secara intensif dan mendalam, sehingga menjawab mengapa keadaan itu terjadi dan peneliti diharapkan dapat menemukan bagaimana Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan

Keselamatan Kerja di PT. Pelindo Marine Service.

Fokus Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan, kendala, dan hal-hal yang menyimpang dari implementasi kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. Pelindo Marine Service dengan menggunakan pendekatan George Erwards III.

Informan Penelitian

Metode untuk mendapatkan informan in-depth interview yaitu dilakukan secara purposive sampling, dengan informan penelitian adalah pihak-pihak memiliki wewenang dan pengetahuan mengenai implementasi K3 di PT. PMS. Unsur manusia sebagai instrumen yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipatif dan unsur informan adalah Direksi, Bagian K3, dan Pekerja.

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data peneliti melakukan tahapan analisa;

1. Reduksi Data, Peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data yang kasar yang dilaksanakan dalam penelitian dan mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.
2. Penyajian Data, Peneliti menyajikan data singkat berupa suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan, Peneliti melakukan kegiatan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian pada saat penelitian berakhir.
4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, digunakan teknik metode triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Satori and Komariah, 2011). Tujuan

triangulasi ialah memeriksa kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain (Nasution, 1992). Untuk menjamin kepercayaan data peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian, kemudian melakukan observasi partisipatif dan melakukan telaah dokumen untuk melengkapi informasi implementasi SMK3 perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Sistem Manajemen K3 PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut.

1. Diperoleh tingkat capaian implementasi Sistem Manajemen K3 tingkat lanjutan di PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya yaitu 83% dengan kategori tingkat penilaian penerapan baik. Elemen yang memenuhi kriteria sebanyak 137 elemen, yang parsial sebanyak 28 elemen dan 1 elemen yang tidak memenuhi kriteria. Untuk yang belum memenuhi kriteria agar segera diimplementasikan dan melengkapi dokumen terkait.
2. Untuk aspek Struktur Birokrasi PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya mampu mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang dapat berintegrasi dengan manajemen perusahaan. Hal ini terbukti dengan adanya penghargaan zero accident yang diraih oleh perusahaan yang secara tidak langsung berdampak positif terhadap income perusahaan dan produktivitas kerja. Adapun acuan perusahaan yaitu UU No 1 Tahun 1970, PP No 50 Tahun 2012 dan peraturan direksi No 38 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan K3. Namun, untuk PP No 50 Tahun 2012 agar dilaksanakan evaluasi internal dan eksternal secara berkala.
3. Untuk aspek Disposisi PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya telah memiliki kebijakan K3 dan komitmen tertulis yang diperbarui dan telah diajukan kepada pimpinan puncak. Sementara untuk karyawan, telah memiliki kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan K3 di tempat kerja sehingga mereka berpartisipasi aktif dengan menaati peraturan yang ada melalui bekerja sesuai SOP dan penggunaan APD.
4. Untuk aspek Sumber Daya PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya telah memiliki tim P2K3 dengan sekretaris P2K3 yang telah bersertifikasi Ahli K3 umum sesuai dengan peraturan dan perundangan dan perwakilan ahli K3 dari tiap divisi. Untuk tenaga kerja baru telah diberikan informasi mengenai K3 sebelum bekerja. Sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus seperti operator telah memiliki lisensi. TPM juga telah menyiapkan sarana dan prasarana dan anggaran khusus untuk pelaksanaan K3 di perusahaan. Untuk keadaan darurat juga telah ada tim quick respon untuk penanganan keadaan darurat.
5. Untuk aspek komunikasi PT. Pelindo Marine Service (Persero) Terminal Petikemas Surabaya antara pihak manajemen dan pihak lain di perusahaan dilaksanakan secara lisan maupun persuratan. Bagi visitor wajib mengikuti safety induction sebelum memasuki area pabean. TPM juga secara rutin melakukan pelaporan setiap triwulan kepada dinas tenaga kerja dan laporan tahunan kepada kantor pusat untuk evaluasi kinerja K3. Namun, untuk pendokumentasian dan pengendalian dokumen terkait K3

masih perlu dilengkapi agar dapat memudahkan investigasi dan audit saat dibutuhkan.

KESIMPULAN

Model implementasi sistem manajemen K3 di PT. Pelindo Marine Service terdiri dari aspek- aspek yang mendukung tercapainya implementasi berdasarkan tujuan sistem manajemen K3 dengan variabel yang sociated, yaitu manajemen terintegrasi, prosedur dan instruksi kerja, komitmen K3, kesadaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelatihan, manajemen risiko dan manajemen tanggap darurat, komunikasi, pelaporan dan pendokumentasian dan pengendalian dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2011). *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan* (Vol. I). Gedung La Macca Lt. 1 Kampus UNM Gunung Sari Baru Jl. A.P Pettarani Makassar 90222 Badan Penerbit UNM
- BA Setiono, I. A. Brahmasari, S. Mujanah. (2018). "Effect of Safety Culture, Safety Leadership, and Safety Climate on Employee Commitments and Employee Performance PT. Pelindo III (Persero) East Java Province". - *Sebelas Maret Business Review*, 2018 DOI: <https://doi.org/10.20961/snbr.v3i1.13680>
- BA Setiono. (2019). "Budaya Keselamatan, Kepemimpinan Keselamatan, Pelatihan Keselamatan, Iklim Keselamatan dan Kinerja" Publication date 2019/12/1 Publisher Penerbit Ifatama Jawara
- BA Setiono. (2019). "Pengaruh Budaya K3 dan Iklim K3 Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pelindo III (Persero) Provinsi Jawa Timur" - *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan*
- Kepelabuhanan*, 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.30649/jurapk.v9i1.52>
- Dessler, Gary. (2007). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga.
- E Sustiyatik, BA Setiono, A Ridwan. (2019). "Practices of injustice and workplace deviance: the case of ASEAN Manufacturing firm" *Polish Journal of Management Studies, Polish Journal of Management Studies*, DOI: 10.17512
- Kasmad. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (F. Ardlin Ed). BTN KNPI Jl. Benua 1 A3/2 Daya Makassar: Kedai Aksara.
- Pangkey, Febyana. (2012). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia* (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). *Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 2, No. 2*.
- Rizky Argama. (2006). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*. Makalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Robiana Modjo. (2007). *Modul Promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. <http://www.staff.ui.ac.id/internal/132096019/modul-promosi-kesehatan-dan-keselamatankerja.pdf>. Diakses 29 September 2010.
- Schuler, Randall S. dan Susan E. Jackson. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Abad Ke-21*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, Budi. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.